MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 11 Tahun 2026

DAMPAK KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Endang Puji Astutik[1], Faisal Yusuf[2], Raihan Rafli Ramdhan[3]
Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
dosen01682@unpam.ac.id, faisalsaglo09@gmail.com, reyhanramdan95@gmail.com

Abstract
Income distribution inequality is a macroeconomic issue directly related to the objective of development, namely the improvement of overall societal welfare. Although Indonesia's economic growth has remained relatively stable and poverty has tended to decline, the Gini ratio rose again from 0.363 in September 2025 to 0.368 in March 2026, raising questions about the extent to which the benefits of development are shared evenly across all segments of society. This study aims to analyze the impact of income distribution inequality on societal welfare in Indonesia by synthesizing empirical evidence and identifying the transmission channels that connect the two. Specifically, it addresses three questions: how inequality and poverty have evolved in Indonesia over the past five years, how empirical evidence explains the relationship between inequality and welfare, and through which mechanisms inequality affects people's quality of life. It employs a descriptive qualitative approach using a narrative literature review combined with a descriptive analysis of secondary data from Statistics Indonesia (BPS) covering March 2021 to March 2026. The review corpus consists of reputable national and international journal articles, including Scopus-indexed articles published between 2020 and 2026, which were analyzed using thematic synthesis. Articles were selected for topical relevance and suitability to Indonesia's context, while BPS data depict current empirical conditions. The results show that national expenditure inequality fluctuated between 0.363 and 0.388 during the observation period, with the highest value recorded in March 2023, while inequality in urban areas was consistently higher than in rural areas. At the same time, the poverty rate fell to 8.07 percent in March 2026, yet rural poverty remained at 10.67 percent, approximately 1.7 times the urban poverty rate. The literature synthesis indicates that the impact of inequality on welfare is neither singular nor direct. Inequality is reported to have a negative effect on provincial economic growth and to reduce the benefits that rising income brings to individual life satisfaction. In contrast, several provincial-level studies find no significant direct effect on economic welfare or on the happiness index, so the relationship between the two depends heavily on how welfare is measured, the level of development, and the quality of human capital. Four main transmission channels were identified, namely vulnerability to poverty and economic shocks, limited access to education and intergenerational mobility, interregional disparities, and perceptions of social justice that shape subjective well-being. The novelty of this study lies in combining the most recent inequality data up to March 2026 with a synthesis of evidence across material and subjective dimensions of welfare within a single analytical framework. These findings emphasize that poverty reduction is not automatically accompanied by a more even distribution of development outcomes, so welfare cannot be judged from average income or the number of poor people alone. They also

Article history
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

imply that inequality-reduction policies should rest on strengthening social protection, investing in human capital, promoting balanced regional development, and expanding economic opportunities for low-income groups. Future research is advised to use micro panel data and multidimensional welfare indicators to test causal relationships more rigorously, including comparisons of income and expenditure inequality.
Keywords: Income Distribution Inequality, Gini Ratio, Social Welfare, Poverty, Inclusive Development

Abstrak

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan persoalan makroekonomi yang berkaitan langsung dengan tujuan pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dan tingkat kemiskinan cenderung menurun, rasio Gini kembali meningkat dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat pembangunan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia melalui sintesis bukti empiris dan identifikasi saluran transmisi yang menghubungkan keduanya. Secara spesifik, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana dinamika ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia dalam lima tahun terakhir, bagaimana bukti empiris menjelaskan hubungan ketimpangan dengan kesejahteraan, dan melalui mekanisme apa ketimpangan memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode telaah pustaka naratif yang dipadukan dengan analisis deskriptif data sekunder Badan Pusat Statistik periode Maret 2021 hingga Maret 2026. Korpus telaah terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, termasuk artikel yang terindeks Scopus dan terbit pada tahun 2020 sampai 2026, yang dianalisis menggunakan sintesis tematik. Pemilihan artikel dilakukan berdasarkan relevansi topik, kejelasan metode, dan kesesuaian konteks dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia, sedangkan data Badan Pusat Statistik digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris terkini sebagai landasan interpretasi. Seluruh angka empiris yang disajikan bersumber dari rilis Badan Pusat Statistik pada 5 Agustus 2026 dan literatur yang telah melalui proses penelaahan sejawat. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran nasional berfluktuasi pada kisaran 0,363 hingga 0,388 selama periode pengamatan dengan nilai tertinggi pada Maret 2023, sedangkan ketimpangan di wilayah perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada wilayah perdesaan. Pada sisi lain, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, tetapi kemiskinan perdesaan masih berada pada 10,67 persen atau sekitar 1,7 kali kemiskinan perkotaan. Sintesis literatur mengindikasikan bahwa dampak ketimpangan terhadap kesejahteraan tidak bersifat tunggal dan langsung. Ketimpangan dilaporkan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi serta menurunkan manfaat kenaikan pendapatan bagi kepuasan hidup individu. Sebaliknya, beberapa studi pada tingkat provinsi tidak menemukan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi maupun indeks kebahagiaan, sehingga hubungan keduanya sangat bergantung pada cara pengukuran kesejahteraan, tingkat pembangunan, dan kualitas modal manusia. Empat saluran transmisi utama berhasil diidentifikasi, yakni kerentanan

terhadap kemiskinan dan guncangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan mobilitas antargenerasi, disparitas antarwilayah, serta persepsi keadilan sosial yang membentuk kesejahteraan subjektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaduan data ketimpangan terkini hingga Maret 2026 dengan sintesis bukti lintas dimensi kesejahteraan material dan subjektif dalam satu kerangka analitis. Temuan ini menegaskan bahwa penurunan kemiskinan belum otomatis diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan, sehingga indikator kesejahteraan tidak cukup dilihat dari rata-rata pendapatan atau jumlah penduduk miskin saja. Temuan ini juga mengimplikasikan bahwa kebijakan pengurangan ketimpangan perlu bertumpu pada penguatan perlindungan sosial, investasi modal manusia, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan perluasan kesempatan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data panel mikro dan indikator kesejahteraan multidimensi untuk menguji hubungan kausal secara lebih ketat, termasuk dengan membandingkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pengeluaran serta menelaah heterogenitas dampak antarkelompok penduduk dan antarwilayah.
Kata Kunci: ***Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Rasio Gini, Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan, Pembangunan Inklusif***

1. Pendahuluan

Tujuan akhir pembangunan ekonomi bukan sekadar peningkatan produk domestik bruto, melainkan perbaikan kualitas hidup manusia yang tercermin dalam kesejahteraan material maupun nonmaterial. Perdebatan ilmiah mutakhir menegaskan bahwa ukuran agregat seperti PDB tidak mampu menangkap bagaimana hasil pembangunan terdistribusi di antara anggota masyarakat [1], sementara kesejahteraan yang utuh menuntut pertimbangan atas kepuasan hidup dan peluang yang dimiliki individu [2]. Dalam konteks Indonesia, penilaian atas standar hidup selama lima dekade menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan dan perbaikan indikator sosial berlangsung beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi kecepatan kemajuan setiap dimensi berbeda-beda [3].

Secara empiris, dinamika ketimpangan di Indonesia belakangan ini memperlihatkan pola yang patut dicermati. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio Gini nasional sebesar 0,368 pada Maret 2026, naik 0,005 poin dari 0,363 pada September 2025, dengan ketimpangan perkotaan (0,387) jauh lebih tinggi daripada perdesaan (0,296) [4], [5]. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,07 persen atau setara 22,93 juta penduduk [5]. BPS menafsirkan kombinasi tersebut sebagai indikasi bahwa pertumbuhan pengeluaran masyarakat belum dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok penduduk [6]. Kondisi ini memunculkan persoalan ilmiah yang penting, yaitu apakah ketimpangan yang kembali melebar mengancam kesejahteraan masyarakat meskipun kemiskinan terus turun.

Secara teoretis, hubungan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan telah lama dibahas melalui hipotesis kurva U terbalik Kuznets, yang memperkirakan ketimpangan meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun pada tahap selanjutnya [7]. Studi-studi di Indonesia menghasilkan bukti yang beragam: pertumbuhan ekonomi dilaporkan menurunkan ketimpangan antarprovinsi [8], [9], sedangkan ketimpangan pendapatan dilaporkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 provinsi [10]. Keragaman temuan ini

menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hanya akibat, melainkan juga faktor yang dapat membentuk lintasan pembangunan dan kesejahteraan.

Meskipun demikian, bukti mengenai dampak ketimpangan terhadap kesejahteraan itu sendiri masih belum seragam. Telaah sistematis dan meta-analisis atas 39 studi menemukan asosiasi yang lemah dan kompleks antara ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan subjektif, yang dimoderasi oleh tingkat pembangunan ekonomi negara [11]. Analisis lintas negara yang lebih baru menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan memberikan peningkatan kepuasan hidup yang jauh lebih besar di negara yang lebih setara [12], sedangkan studi tingkat provinsi di Indonesia tidak menemukan pengaruh signifikan ketimpangan terhadap indeks kebahagiaan [13]. Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum adanya sintesis yang memadukan data ketimpangan terkini dengan bukti lintas dimensi kesejahteraan material, kesempatan, dan subjektif dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan (1) menggambarkan dinamika ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2026, (2) mensintesis bukti empiris mengenai dampak ketimpangan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan (3) mengidentifikasi saluran transmisi yang menghubungkan keduanya. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi data BPS terkini dengan sintesis studi nasional dan internasional bereputasi dalam satu kerangka analitis yang menempatkan ketimpangan sebagai determinan kesejahteraan multidimensi, bukan sekadar sebagai variabel statistik.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep dan Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan menggambarkan sejauh mana pendapatan atau pengeluaran tersebar secara tidak merata di antara individu dan rumah tangga. Indikator yang paling lazim digunakan adalah rasio Gini dengan rentang nilai nol sampai satu, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar [6]. Perlu dicatat bahwa rasio Gini yang dipublikasikan BPS mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga tidak identik dengan ketimpangan pendapatan [4], [6].

Kerangka klasik Kuznets memandang ketimpangan sebagai konsekuensi transformasi struktural: ketika tenaga kerja berpindah dari sektor pertanian ke sektor modern, ketimpangan meningkat terlebih dahulu sebelum menurun [7]. Studi regresi panel pada 32 provinsi di Indonesia pada periode 2010–2020 mengaitkan ketimpangan regional dengan modal manusia, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa ketimpangan merupakan fenomena multifaktor dan tidak semata-mata ditentukan oleh tahap pembangunan [14].

2.2 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat bersifat multidimensi. Kritik terhadap PDB sebagai ukuran kemajuan menekankan perlunya pengukuran kesejahteraan sosial yang memperhitungkan distribusi, kesempatan, dan kualitas hidup [1]. Dari perspektif psikologi ekonomi, kesejahteraan juga mencakup evaluasi subjektif individu atas kehidupannya, sehingga pendapatan yang lebih tinggi tidak selalu identik dengan kesejahteraan yang lebih tinggi [2]. Di Indonesia, pendekatan multidimensi diterapkan dengan menelaah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, upah, gender,

dan gizi secara simultan, yang menghasilkan gambaran bahwa laju perbaikan antardimensi tidak seragam [3], [15].

2.3 Ketimpangan dan Kesejahteraan: Bukti Internasional

Bukti internasional memperlihatkan hubungan yang tidak sederhana. Meta-analisis atas 24 studi memperoleh koefisien korelasi gabungan yang hampir nol antara ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan subjektif, dengan heterogenitas sangat tinggi dan efek yang dimoderasi oleh tingkat pembangunan ekonomi [11]. Temuan yang lebih rinci pada tingkat individu menunjukkan bahwa kepuasan hidup yang diperoleh dari kenaikan pendapatan sebesar 10 persen lebih dari dua kali lipat di negara berketimpangan rendah dibandingkan di negara berketimpangan tinggi, sejalan dengan hipotesis peringkat sosial (*income rank hypothesis*) [12]. Artinya, ketimpangan tidak hanya memengaruhi tingkat kesejahteraan, tetapi juga mengubah nilai pendapatan bagi kesejahteraan.

2.4 Bukti Empiris di Indonesia

Pada tingkat provinsi, ketimpangan pendapatan dilaporkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pendidikan dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan [10]. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, sementara kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan [9]. Studi dengan analisis jalur menemukan bahwa pertumbuhan menurunkan ketimpangan, tetapi kesejahteraan ekonomi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh ketimpangan [8]. Sementara itu, pada indikator kesejahteraan subjektif, IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kebahagiaan, sedangkan ketimpangan tidak signifikan [13].

Dimensi dinamis kesejahteraan dikaji melalui mobilitas ekonomi dan ketahanan terhadap guncangan. Analisis mobilitas antargenerasi berbasis *Indonesian Family Life Survey* menemukan mobilitas absolut yang tinggi, namun hanya 9,29 persen anak dari orang tua kuintil terendah yang mencapai kuintil tertinggi, dengan lama sekolah anak sebagai salah satu determinan terkuat [16]. Pada sisi guncangan, simulasi dampak pandemi Covid-19 memperkirakan lonjakan kemiskinan dari 9,2 persen menjadi antara 9,7 dan 16,6 persen sehingga perluasan perlindungan sosial diperlukan [17]; kajian lanjutan menelaah dampak Covid-19 sekaligus peran program perlindungan sosial terhadap kemiskinan [18].

2.5 Kerangka Konseptual dan Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan tinjauan di atas, penelitian ini membangun kerangka konseptual bahwa ketimpangan distribusi pendapatan memengaruhi kesejahteraan melalui empat saluran: (1) kerentanan terhadap kemiskinan dan guncangan, (2) akses terhadap pendidikan dan mobilitas antargenerasi, (3) disparitas antarwilayah, dan (4) persepsi keadilan sosial yang membentuk kesejahteraan subjektif [12], [14], [16], [17]. Kesenjangan penelitian yang diisi adalah ketiadaan sintesis yang menghubungkan keempat saluran tersebut dengan data ketimpangan terbaru hingga tahun 2026, mengingat studi-studi terdahulu cenderung berfokus pada satu dimensi kesejahteraan [8], [13].

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode telaah pustaka naratif (*narrative literature review*) yang dipadukan dengan analisis deskriptif data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mensintesis bukti yang beragam dan menjelaskan mekanisme, bukan menguji satu hipotesis kausal tunggal, sebagaimana lazim dalam telaah atas hubungan ketimpangan dan kesejahteraan yang hasilnya heterogen [11]. Objek penelitian adalah Indonesia pada tingkat nasional dengan penekanan pada perbandingan perkotaan dan perdesaan.

Data empiris berupa rasio Gini dan tingkat kemiskinan periode Maret 2021 sampai Maret 2026 yang dipublikasikan BPS berdasarkan Susenas dan diumumkan BPS pada konferensi pers 5 Agustus 2026 dan dilaporkan oleh media nasional [4], [5], [19]. Penggunaan data BPS sejalan dengan praktik studi-studi terdahulu mengenai ketimpangan dan kesejahteraan di Indonesia [9], [13]. Korpus pustaka dihimpun melalui penelusuran daring dengan kata kunci *income inequality*, *welfare*, *poverty*, *Indonesia*, ketimpangan pendapatan, dan kesejahteraan pada laman penerbit jurnal dan repositori ilmiah. Artikel dimasukkan apabila (a) diterbitkan di jurnal yang melalui penelaahan sejawat, (b) membahas hubungan ketimpangan dengan pertumbuhan, kemiskinan, kesejahteraan, atau mobilitas, dan (c) diprioritaskan terbit pada tahun 2020 sampai 2026, kecuali karya teoretis klasik. Artikel yang tidak melalui penelaahan sejawat dikeluarkan dari korpus.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, statistik deskriptif disajikan untuk menggambarkan tren ketimpangan dan kemiskinan serta selisih perkotaan–perdesaan. Kedua, temuan setiap studi diekstraksi menurut cakupan data, metode, dan arah pengaruh, kemudian dipetakan dalam matriks sintesis [9], [10], [13]. Ketiga, sintesis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam saluran transmisi. Keabsahan interpretasi dijaga melalui triangulasi lintas sumber, yakni membandingkan bukti dari jurnal internasional, jurnal nasional, dan data resmi, serta dengan mencatat keterbatasan pengukuran bahwa rasio Gini BPS merepresentasikan ketimpangan pengeluaran [6]. Seluruh analisis dilakukan secara manual tanpa perangkat lunak statistik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dinamika Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia

Tabel 1 menyajikan perkembangan rasio Gini nasional serta perkotaan dan perdesaan pada beberapa titik pengamatan. Rasio Gini nasional berada pada 0,384 pada Maret 2021, mencapai nilai tertinggi 0,388 pada Maret 2023, kemudian menurun hingga 0,363 pada September 2025 sebelum naik kembali menjadi 0,368 pada Maret 2026 [4], [19]. Ketimpangan perkotaan konsisten lebih tinggi daripada perdesaan, dengan selisih sebesar 0,091 poin pada Maret 2026 (0,387 berbanding 0,296) [5], [19].

Tabel 1. Rasio Gini Indonesia, Maret 2021–Maret 2026

Periode	Nasional	Perkotaan	Perdesaan
Maret 2021	0,384	0,401	0,315
September 2021	0,381	–	–
Maret 2023	0,388	0,409	–
Maret 2025	0,375	0,395	0,299

Periode	Nasional	Perkotaan	Perdesaan
September 2025	0,363	0,383	0,295
Maret 2026	0,368	0,387	0,296

Sumber: BPS (Susenas) sebagaimana dilaporkan dalam [4], [5], [19]; tanda "–" berarti tidak tersedia pada sumber yang dirujuk.

Dari sisi kemiskinan, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 23,36 juta menjadi 22,93 juta orang; garis kemiskinan nasional tercatat Rp669.235 per kapita per bulan [5]. Disparitas wilayah tampak jelas, yakni kemiskinan perdesaan sebesar 10,67 persen sekitar 1,7 kali kemiskinan perkotaan sebesar 6,34 persen [5]. Pola ini menghadirkan paradoks yang menjadi inti persoalan penelitian: kemiskinan menurun, tetapi ketimpangan pengeluaran meningkat, sehingga perbaikan di dasar distribusi tidak serta-merta berarti pemerataan secara keseluruhan [5], [6].

4.2 Sintesis Bukti Empiris

Tabel 2 meringkas studi-studi yang dirujuk beserta arah temuannya. Secara umum terdapat dua kelompok bukti. Kelompok pertama menunjukkan bahwa ketimpangan merugikan proses pembangunan, baik karena menghambat pertumbuhan [10] maupun karena menurunkan nilai kenaikan pendapatan bagi kepuasan hidup [12]. Kelompok kedua tidak menemukan pengaruh langsung yang signifikan terhadap indikator kesejahteraan tertentu, seperti kesejahteraan ekonomi provinsi [8] dan indeks kebahagiaan [13], serta hanya menemukan asosiasi yang lemah dalam meta-analisis [11].

Tabel 2. Ringkasan Bukti Empiris tentang Ketimpangan dan Kesejahteraan

Studi	Cakupan dan metode	Temuan utama
Handayani dan Hanifa (2024) [10]	34 provinsi, 2020–2022; regresi data panel	Ketimpangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Panggabean (2025) [9]	34 provinsi, 2015–2022; regresi data panel	Pertumbuhan dan IPM menurunkan ketimpangan; kemiskinan meningkatkannya
Kurniasih (2017) [8]	165 observasi panel provinsi; analisis jalur	Pertumbuhan menurunkan ketimpangan; kesejahteraan ekonomi tidak dipengaruhi signifikan oleh ketimpangan
Sahali dkk. (2026) [13]	33 provinsi, 2017 dan 2021; OLS	IPM berpengaruh positif terhadap kebahagiaan; ketimpangan tidak signifikan
Quispe-Torreblanca dkk. (2021) [12]	Data lintas negara; analisis pendapatan dan kepuasan hidup	Kenaikan pendapatan 10% menambah kepuasan hidup lebih dari dua kali lipat di negara lebih setara
Ngamaba dkk. (2017) [11]	39 studi (24 dalam meta-analisis)	Asosiasi ketimpangan–kesejahteraan subjektif lemah dan dimoderasi tingkat pembangunan
Dartanto dkk. (2023) [16]	*Indonesian Family Life Survey*; regresi kuantil	Hanya 9,29% anak dari kuintil terendah mencapai kuintil tertinggi; lama sekolah salah satu determinan terkuat
Suryahadi dkk. (2020) [17]	Simulasi dampak Covid-19	Kemiskinan diperkirakan naik dari 9,2% menjadi 9,7%–16,6%

Sumber: diolah penulis dari literatur yang dirujuk.

Divergensi temuan tersebut dapat dijelaskan oleh perbedaan cara mengukur kesejahteraan. Studi yang menggunakan indikator hasil pembangunan seperti pertumbuhan atau mobilitas cenderung menangkap dampak ketimpangan [10], [16], sedangkan studi yang menggunakan indeks komposit tingkat provinsi dengan jumlah observasi terbatas memiliki daya uji yang lebih rendah [13]. Selain itu, rasio Gini berbasis pengeluaran tidak identik dengan ketimpangan pendapatan, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan dapat berbeda apabila diukur dengan data pendapatan [6]. Dengan demikian, ketiadaan pengaruh signifikan pada sebagian studi tidak serta-merta berarti ketimpangan tidak relevan bagi kesejahteraan.

4.3 Saluran Transmisi Dampak Ketimpangan terhadap Kesejahteraan

Saluran pertama: kerentanan terhadap kemiskinan dan guncangan. Kemiskinan berhubungan positif dengan ketimpangan [9], dan rumah tangga di dasar distribusi paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Simulasi dampak Covid-19 menunjukkan bahwa kemiskinan sangat sensitif terhadap perlambatan pertumbuhan, dengan kemungkinan kenaikan hingga 16,6 persen pada skenario terburuk [17]. Karena itu, kelompok di dasar distribusi menanggung risiko kesejahteraan yang lebih besar, sehingga peran program perlindungan sosial sebagai penyangga saat krisis relevan untuk terus ditelaah [18].

Saluran kedua: akses pendidikan dan mobilitas antargenerasi. Ketimpangan memengaruhi kesempatan karena lama sekolah anak merupakan salah satu determinan terkuat mobilitas antargenerasi [16]. Ketika kelompok berpendapatan rendah menghadapi keterbatasan akses pendidikan, posisi ekonomi orang tua cenderung diwariskan kepada anak, dan hanya sebagian kecil anak dari kuintil terendah yang mencapai kuintil tertinggi [16]. Bukti provinsi mengonfirmasi peran modal manusia, sebab IPM berhubungan negatif dengan ketimpangan [9] dan berhubungan positif dengan kebahagiaan [13]. Dengan demikian, ketimpangan dan modal manusia saling memperkuat dalam menentukan kesejahteraan jangka panjang.

Saluran ketiga: disparitas antarwilayah. Ketimpangan di Indonesia memiliki dimensi spasial yang kuat, tampak dari selisih rasio Gini perkotaan dan perdesaan serta kesenjangan kemiskinan antarwilayah [5], [19]. Studi regresi panel pada 32 provinsi mengaitkan ketimpangan regional dengan modal manusia, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi [14]. Pola ini mengindikasikan bahwa pemerataan kesejahteraan memerlukan pembangunan yang tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu, serta sejalan dengan temuan bahwa tidak semua indikator sosial membaik dengan kecepatan yang sama [3].

Saluran keempat: persepsi keadilan sosial dan kesejahteraan subjektif. Hipotesis peringkat sosial menjelaskan bahwa di negara yang lebih timpang, kenaikan pendapatan menggeser posisi relatif seseorang lebih sedikit sehingga kepuasan hidup yang diperoleh lebih kecil [12]. Efek ini bekerja melalui persepsi posisi relatif dan dapat membantu menjelaskan mengapa meta-analisis hanya menemukan asosiasi yang lemah tanpa memperhitungkan tingkat pembangunan [11]. Karena kesejahteraan mencakup evaluasi subjektif [2], saluran ini penting dalam menafsirkan kasus Indonesia, terutama di wilayah perkotaan yang ketimpangannya lebih tinggi [19].

4.4 Implikasi Kebijakan dan Kontribusi Ilmiah

Temuan sintesis berimplikasi pada beberapa arah kebijakan. Pertama, perlindungan sosial perlu diperluas dan ditargetkan secara tepat agar kelompok rentan tidak jatuh ke dalam kemiskinan saat terjadi guncangan [17]. Kedua, investasi pendidikan dan pembangunan manusia perlu diprioritaskan karena menjadi kunci mobilitas dan pengurangan ketimpangan [9], [16]. Ketiga, kebijakan pemerataan pembangunan antarwilayah perlu diperkuat agar kesenjangan perkotaan–perdesaan tidak melebar [5], [14]. Keempat, evaluasi kesejahteraan sebaiknya tidak bertumpu pada rata-rata pendapatan atau jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada distribusinya [1], [15].

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dengan mengonsolidasikan bukti yang tersebar menjadi satu kerangka empat saluran dan menempatkannya pada data ketimpangan terbaru. Berbeda dari studi terdahulu yang menguji satu variabel kesejahteraan [8], [13], penelitian ini menunjukkan bahwa dampak ketimpangan paling tepat dibaca sebagai efek bertingkat melalui kemiskinan, kesempatan, wilayah, dan persepsi. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang deskriptif dan naratif sehingga tidak menghasilkan estimasi kausal, serta penggunaan Gini pengeluaran yang tidak identik dengan ketimpangan pendapatan [6], [11].

5.Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia kembali meningkat pada Maret 2026 (rasio Gini 0,368) meskipun kemiskinan menurun menjadi 8,07 persen, dengan ketimpangan dan kemiskinan yang lebih menonjol masing-masing di wilayah perkotaan dan perdesaan [4], [5]. Bukti nasional dan internasional menunjukkan bahwa dampak ketimpangan terhadap kesejahteraan tidak bersifat tunggal: ketimpangan menghambat pertumbuhan [10] dan menurunkan manfaat kenaikan pendapatan bagi kepuasan hidup [12], tetapi tidak selalu berpengaruh langsung terhadap indikator kesejahteraan tertentu [8], [13].

Dampak tersebut bekerja melalui empat saluran, yakni kerentanan terhadap kemiskinan dan guncangan, akses pendidikan dan mobilitas antargenerasi, disparitas antarwilayah, serta persepsi keadilan sosial [12], [14], [16], [17]. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian distribusi pendapatan dengan menekankan perlunya memandang kesejahteraan secara multidimensi [1], [2]. Secara praktis, pemerintah perlu memadukan perlindungan sosial, investasi modal manusia, dan pemerataan wilayah [9], [17].

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data panel mikro seperti *Indonesian Family Life Survey* untuk mengestimasi dampak kausal ketimpangan terhadap kesejahteraan pada tingkat rumah tangga [16]. Penelitian juga perlu membandingkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pengeluaran, serta menggunakan indikator kesejahteraan multidimensi yang memasukkan dimensi subjektif [11], [13]. Selain itu, pengujian efektivitas program perlindungan sosial dalam menekan ketimpangan antarwilayah dapat menjadi agenda lanjutan yang relevan bagi perumusan kebijakan [14], [18].

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Fleurbaey, “Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare,” *J. Econ. Lit.*, vol. 47, no. 4, pp. 1029–1075, 2009.
[2] E. Diener and M. E. P. Seligman, “Beyond money: Toward an economy of well-being,” *Psychol.*

Sci. Public Interest, vol. 5, no. 1, pp. 1–31, 2004.
[3] H. Hill, "Indonesian living standards over 50 years: A multidimensional analysis," *Asian Econ. J.*, vol. 34, no. 3, pp. 249–274, 2020, doi: 10.1111/asej.12221.
[4] "BPS mencatat jurang kaya dan miskin kembali melebar pada Maret 2026," *Kontan*, Aug. 5, 2026. [Online]. Available: https://nasional.kontan.co.id/news/bps-catat-jurang-kaya-miskin-kembali-melebar-pada-maret-2026
[5] "Tingkat ketimpangan naik, BPS catat rasio Gini di 0,368," *IDXChannel*, Aug. 5, 2026. [Online]. Available: https://www.idxchannel.com/economics/tingkat-ketimpangan-naik-bps-catat-rasio-gini-di-0368/all
[6] "BPS: Gini rasio naik jadi 0,368 pada Maret 2026, ketimpangan melebar," *IDN Times*, Aug. 5, 2026. [Online]. Available: https://www.idntimes.com/business/economy/bps-gini-rasio-naik-jadi-0-368-pada-maret-2026-ketimpangan-melebar-00-gshdq-8f1zjy
[7] S. Kuznets, "Economic growth and income inequality," *Am. Econ. Rev.*, vol. 45, no. 1, pp. 1–28, 1955.
[8] E. P. Kurniasih, "Effect of economic growth on income inequality, labor absorption, and welfare," *Econ. J. Emerg. Mark.*, vol. 9, no. 2, pp. 181–188, 2017, doi: 10.20885/ejem.vol9.iss2.art7.
[9] M. Panggabean, "Income inequality in Indonesia and its influencing factors," *Int. J. Innov. Res. Sci. Stud.*, vol. 8, no. 3, pp. 4069–4082, 2025.
[10] N. Handayani and N. Hanifa, "Pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan di Indonesia," *Independent: J. Econ.*, vol. 4, no. 1, pp. 112–124, 2024, doi: 10.26740/independent.v4i1.60729.
[11] K. H. Ngamaba, M. Panagioti, and C. J. Armitage, "Income inequality and subjective well-being: A systematic review and meta-analysis," *Qual. Life Res.*, 2017, doi: 10.1007/s11136-017-1719-x.
[12] E. G. Quispe-Torreblanca, G. D. A. Brown, C. J. Boyce, A. M. Wood, and J. De Neve, "Inequality and social rank: Income increases buy more life satisfaction in more equal countries," *Pers. Soc. Psychol. Bull.*, vol. 47, no. 4, pp. 519–539, 2021, doi: 10.1177/0146167220923853.
[13] I. Sahali, A. P. Regitha M, and K. Rahmadani, "Determinasi indeks kebahagiaan di Indonesia: Analisis pengaruh IPM, belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan pendapatan," *J. Ilm. Ecosystem*, vol. 26, no. 1, pp. 142–149, 2026, doi: 10.35965/eco.v26i1.8710.
[14] S. Suparman and M. Muzakir, "Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach," *Cogent Econ. Financ.*, vol. 11, no. 2, Art. no. 2251803, 2023, doi: 10.1080/23322039.2023.2251803.
[15] H. Hill, "What's happened to poverty and inequality in Indonesia over half a century?," *Asian Dev. Rev.*, vol. 38, no. 1, pp. 68–97, 2021, doi: 10.1162/adev_a_00158.
[16] T. Dartanto, C. K. Can, F. R. Moeis, and J. F. Rezki, "A dream of offspring: Two decades of intergenerational economic mobility in Indonesia," *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 59, no. 2, pp. 209–241, 2023, doi: 10.1080/00074918.2021.1970109.
[17] A. Suryahadi, R. Al Izzati, and D. Suryadarma, "Estimating the impact of Covid-19 on poverty in Indonesia," *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 56, no. 2, pp. 175–192, 2020, doi: 10.1080/00074918.2020.1779390.
[18] A. Suryahadi, R. Al Izzati, and A. Yumna, "The impact of Covid-19 and social protection programs on poverty in Indonesia," *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 57, no. 3, pp. 267–296, 2021.
[19] "Ketimpangan penduduk meningkat, Gini ratio naik ke 0,368," *RMOL*, Aug. 5, 2026. [Online]. Available: https://rmol.id/bisnis/read/2026/08/05/717252/ketimpangan-penduduk-meningkat-gini-ratio-naik-ke-0-368